

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif ditinjau dari Kamus Besar Indonesia memiliki arti bisa menciptakan hasil, mulai berlaku, akibat atau efeknya, ada pengaruh. Efektivitas bisa didefinisikan sebagai tolak ukur keberhasilan berdasarkan tujuan yang telah dicapai.¹

Pengertian efektivitas menurut Siagian yang dikutip oleh Aswar Annas, efektivitas merupakan penggunaan sumber daya yang tersedia, sarana dan prasarana dalam skala tertentu, hal ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa barang dan jasa yang sedang dijalankan. Tepat atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan merupakan salah satu tolak ukur dari Efektivitas kegiatan tersebut.² Efektivitas dapat diartikan lebih jelas menurut Harbani Pasolog yang mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata “efek” dan istilah ini dipakai untuk menjadi penghubung sebab akibat. Hal ini disebabkan karena efektivitas dapat dinilai sebagai penyebab dari variabel lain yang berarti bahwa tujuan yang sudah dicapai.³

¹ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif> Diakses pada Minggu, 19 Maret 2023 Pukul 21:39.

² Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), 74.

³ Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 4.

Dari beberapa penjelasan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi dimana berhasil atau tidaknya suatu program dalam organisasi atau kelompok, berhasil memiliki arti ketika hasil yang dicapai sesuai dengan kehendak.

2. Penanda Efektivitas

Penanda dari efektivitas sangat diperlukan dalam menentukan atau mengukur efektivitas dari suatu program, sebab bukanlah hal yang mudah dalam menentukan hal tersebut. Karena efektivitas dapat dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada siapa yang menilai serta menerapkannya. Seperti contoh manajer produksi menentukan tingkat efektivitas yang berupa kualitas dan kuantitas dari barang maupun jasa, jika melihat dari sisi produktivitas. Tingkat efektivitas bisa diukur juga dengan membandingkan antara *planning* yang telah diputuskan dengan hasil yang telah terwujud di lapangan. Namun, apabila usaha atau hasil dari aktivitas tidak dijalankan dengan prosedur yang tepat hingga mengakibatkan tujuan yang tak tercapai, maka hal itu dinilai tidak efektif.⁴

Adanya kriteria atau ukuran dalam menentukan efektivitas sebuah kebijakan sesuai dengan pendapat dari Gibson yang dikutip Iga Rosalina, diantaranya:

- a. Tujuan yang akan dicapai nampak jelas, hal ini memiliki arti agar karyawan dalam menjalankan tugas dapat mencapai tujuan organisasi dan tepat sasaran.

⁴ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No.01(februari,2012), 3.

- b. Jelasnya strategi terhadap pencapaian target atau tujuan, dapat diketahui jika strategi merupakan sebuah cara yang dijalankan dalam upaya meraih target yang diputuskan dengan tidak salah arah.
- c. Metode analisis dan penyusunan kebijakan yang matang, artinya kebijakan harus dapat menjadi jembatan antara tujuan dan usaha dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- d. Persiapan yang matang, pada dasarnya suatu keputusan harus diambil untuk dikerjakan di masa mendatang.
- e. Perumusan program yang tepat, suatu rencana masih butuh penjabaran secara bertahap dalam implementasi hal tersebut pada pelaksanaan suatu aktivitas.
- f. Terdapatnya sarana dan prasarana dalam bekerja, hal ini merupakan sebuah indikator efektivitas yang menunjukkan dan menambah kemampuan agar produktif.
- g. Adanya pengawasan dan pengendalian yang bersifat mengarahkan.⁵

B. Pengelolaan

1. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan adalah aktivitas yang dimulai dengan menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan hingga pengawasan dan penilaian, guna untuk menghasilkan suatu yang lebih efektif dan efisien dan

⁵ Ibid, 4.

kemudian sesuatu itu dapat dijadikan sebagai sumber untuk penyempurnaan dan peningkatan dari yang telah direncanakan sebelumnya.⁶

2. Definisi Pengelolaan Keuangan

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan.⁷

1. Pengelolaan Infak

Pengelolaan infak adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan infak. Pengelolaan infak berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pengelolaan infak bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan infak sesuai dengan tuntutan syari'at agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

⁶ Nurlaila, *Pengelolaan Pengajaran*, (Palembang: CV. Amanah, 2015), 4.

⁷ Sukilah, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Pemberdayaan Wanita Nelayan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga", *Tsaqofah*, Volume 1, Nomor 3 (November 2021), 178.

c. Meningkatkan hasil guna daya infaq.⁸

C. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses input (sumberdaya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumberdaya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual.

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan.⁹

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merumuskan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dari suatu kesejahteraan dengan dibagi menjadi lima kategori keluarga, diantaranya :¹⁰

1. Keluarga Pra Sejahtera

Pada Kategori ini menggambarkan kondisi keluarga yang belum mampu memenuhi salah enam dari indikator dasar yaitu sandang, pangan,

⁸ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019), 13.

¹⁰ BKKBN, *Batasan dan Pengertian MDK*, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> , diakses tanggal 27 September 2023 pukul 09:16.

papan, kesehatan dan pendidikan. Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu :

- a. Melaksanakan ibadah berdasarkan agama masing-masing anggota keluarga
- b. Anggota keluarga makan 2 kali atau lebih
- c. Memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, sekolah, bekerja, maupun berpergian
- d. Bagian terluas lantai rumah tidak dari tanah
- e. Apabila anak sakit dan Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawa ke sarana kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

Kategori ini menggambarkan keluarga yang sudah mampu untuk memenuhi indikator dasar akan tetapi belum bisa memenuhi indikator psikologisnya yang meliputi :

- a. Melaksanakan ibadah secara teratur oleh anggota keluarganya
- b. Menyediakan protein daging/ telur minimal 1 kali dalam seminggu
- c. Memperoleh pakaian baru minimal satu stel pertahun
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni
- e. Kesehatan seluruh anggota keluarga 3 bulan terakhir sehat
- f. Memiliki penghasilan tetap minimal satu anggota keluarga dengan umur 15 tahun keatas
- g. Anggota keluarga bisa baca tulis huruf latin pada umur 10-60 tahun
- h. Seluruh anak dengan umur 5-15 tahun bersekolah saat ini

- i. Bila anak hidup dua orang atau lebih, keluarga yang masih PUS memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang termasuk pada kategori ini ialah yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar serta aspek psikologis, namun kebutuhan perkembangannya belum mampu dipenuhi dengan Indikator yang terdiri dari tabungan penghasilan, wawasan terkait agama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial pada lingkungan sekitar, berkomunikasi saat makan bersama, dan kemudahan mengakses informasi melalui media.

4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang termasuk dalam kategori ini yaitu menggambarkan kebutuhan dasar, psikologis kebutuhan perkembangan telah dipenuhi oleh suatu keluarga. Namun kebutuhan aktualisasi diri belum terpenuhi, kebutuhan tersebut meliputi kemampuan secara rutin untuk memberikan bantuan pada kegiatan sosial serta aktif sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan sosial masyarakat.

5. Keluarga Sejahtera III plus

Keadaan keluarga yang dimaksudkan dalam kategori ini ialah keluarga yang sudah mampu memenuhi segala kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, psikologis, perkembangan hingga kebutuhan aktualisasi diri.

